

Implementasi Standar Nasional Pendidikan (SNP) di Pendidikan Dasar dan Menengah di Madrasah Tsanawiyah Negeri Batu Bara

**Mesiono¹, Rosidah Hanum Nst², Ismail Mz³, Abdul Salam Nasution⁴,
Abdul Hakim Siregar⁵**

^{1,2,3,4,5} Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email:Mesiono@uinsu.ac.id¹ rosidahhanumnst@gmail.com²
ismailmz@gmail.com³ abdulsalamnastion@gmail.com⁴
abdulhakimsiregar@gmail.com⁵

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk menjelaskan bagaimana perencanaan sekolah di kepada standar pengelolaan pendidikan dalam peningkatan mutu sekolah. untuk peningkatan mutu Madrasah Tsanawiyah Negeri Batu Bara, (2) Untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan program sekolah di Madrasah Tsanawiyah Negeri Batu Bara untuk peningkatan mutu sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Batu Bara, (3) Untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan standar nasional pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Batu Bara untuk peningkatan mutu sekolah di Madrasah Tsanawiyah Negeri Batu Bara dan Madrasah Tsanawiyah Negeri Batu Bara sekolah di Madrasah Tsanawiyah Negeri Batu Bara untuk peningkatan Madrasah Tsanawiyah Negeri Batu Bara. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif dan mengambil lokasi di Madrasah Tsanawiyah Negeri Batu Bara. Subjek dalam penelitian ini adalah warga Madrasah Tsanawiyah Negeri Batu Bara (Kepala Sekolah, Wakil Kepala, Kepala Tata Usaha dan Pegawai Tata usaha). Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi serta teknik mengecek keabsahan data, peneliti menggunakan Triangulasi. Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa Implementasi Standar Pendidikan dalam pendidikan dasar dan menengah dan Peningkatan kualitas Madrasah Tsanawiyah Negeri Batu Bara adalah dengan (1) Perencanaan program pendidikan Madrasah Tsanawiyah Negeri Batu Bara sudah dilakukan dengan mengacu kepada standar nasional pendidikan dalam upaya peningkatan mutu. Perencanaan program di Madrasah Tsanawiyah Negeri Batu Bara lebih menonjol dari point standar yang lainnya. (2) Pelaksanaan program kerja di Madrasah Tsanawiyah Negeri Batu Bara sudah mengacu pada RKAM dan EDM dan peningkatan mutu, Namun masih banyak juga program kerja yang belum teralisasi, seperti kegiatan ekstrakurikuler, perbaikan sarana dan prasarana sekolah, karena kendala pendanaan sekolah yang sangat sedikit. Oleh karena didahulukan program kerja yang lebih penting. (3) Kepala sekolah sudah melaksanakan kegiatan pengawasan dalam peningkatan mutu sekolah. Kegiatan ini dilakukan setiap hari. Namun belum sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan. (4) Kepemimpinan kepala sekolah di Madrasah Tsanawiyah Negeri Batu Bara sudah dilakukan dengan mengacu kepada standar pengelolaan pendidikan dalam peningkatan standar nasional pendidikan dan mutu madrasah.

Kata Kunci: Peningkatan Mutu Madrasah , dalam Standar Nasional Pendidikan

Abstract

The aims of this study are: (1) To explain how school planning is based on education management standards in improving school quality. to improve the quality of the Coal State Madrasah Tsanawiyah, (2) To explain how the implementation of the school program at the Batu Coal State Madrasah Tsanawiyah to improve the quality of the Coal State Madrasah Tsanawiyah, (3) To explain how the implementation of national education standards in the

Batu Bara State Madrasah Tsanawiyah to improve the quality of schools in the Coal State Madrasah Tsanawiyah and Coal State Madrasah Tsanawiyah schools in the Coal State Madrasah Tsanawiyah for the improvement of Coal State Madrasah Tsanawiyah. This research is a descriptive study with qualitative analysis and takes place in the Madrasah Tsanawiyah Negeri Batu Bara. The subjects in this study were the citizens of the Madrasah Tsanawiyah Negeri Batu Bara (Principal, Deputy Head, Head of Administration and Administrative Officer). Data collection techniques used are observation, interviews and documentation as well as techniques to check the validity of the data, researchers use triangulation. The results of the study show that the implementation of educational standards in primary and secondary education and improving the quality of Madrasah Tsanawiyah Negeri Batu Bara is by (1) Planning the education program for Madrasah Tsanawiyah Negeri Batu Bara with reference to national education standards in an effort to improve quality. Program planning at Madrasah Tsanawiyah Negeri Batu Bara is more prominent than other standard points. (2) The implementation of the work program at Madrasah Tsanawiyah Negeri Batu Bara has referred to the RKAM and EDM and quality improvement. However, there are still many work programs that have not been realized, such as extracurricular activities, improvement of school facilities and infrastructure, due to very few school funding constraints. Therefore, priority work programs are more important. (3) The principal has carried out supervision activities in improving the quality of schools. This activity is carried out every day. However, it is not in accordance with education management standards. (4) The leadership of the principal at Madrasah Tsanawiyah Negeri Batu Bara has been carried out by referring to the standard of education management in improving the national education standard and madrasa quality.

Keywords: *Madrasah Quality Improvement, in National Education Standards*

PENDAHULUAN

Pendidikan telah mulai dilaksanakan sejak manusia hadir di muka bumi ini dalam bentuk pemberian warisan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dari orang tua dalam mempersiapkan anak-anaknya menghadapi kehidupan dan masa depannya. Pendidikan merupakan suatu proses yang berlangsung dalam kehidupan sebagai upaya untuk menyeimbangkan kondisi dalam diri dengan kondisi luar diri. Proses penyeimbangan ini merupakan bentuk *survive* yang dilakukan agar diri dapat mengikuti setiap kegiatan yang berlangsung dalam kehidupan (Saroni, 2011: 78).

Pendidikan selain dapat memberikan bekal berbagai pengetahuan, kemampuan dan sikap juga dapat dikembangkan berbagai kemampuan yang dibutuhkan oleh setiap anggota masyarakat, sehingga dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Sasaran proses pendidikan bukan sekedar pengembangan intelektualitas peserta didik dengan memberikan pengajaran atas pengetahuan, pendidikan merupakan proses pemberian pengertian, pemahaman, dan penghayatan sampai pada pengamalan dari ilmu yang diajarkan (Ramdhani, 2014:98).

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa visi pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa. Hal itu dilakukan untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia supaya berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Dukungan pemerintah akan memberikan pengaruh signifikan terhadap setiap proses pembangunan (Ramdhani & Santosa, 2012:89), termasuk di dalamnya pembangunan sumberdaya manusia melalui pendidikan. Penelitian ini merupakan. Terkait dengan visi tersebut telah ditetapkan serangkaian prinsip penyelenggaraan pendidikan untuk dijadikan landasan dalam pelaksanaan reformasi pendidikan. Dari kebutuhan akan pendidikan tersebut pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan yang mencakup standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelola, standar

pembiayaan dan standar penilaian pendidikan. Dari kedelapan standar pendidikan tersebut, standar proses memiliki peran yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

Pemberlakuan standar proses pada satuan pendidikan diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan manajemen kurikulum yang pada akhirnya mampu meningkatkan efektivitas pembelajaran di sekolah, meskipun penetapan standar masih terkait pada tiga masalah utama yang melekat pada sistem pengelolaan pendidikan yakni, kualitas guru yang masih rendah, kualitas kurikulum yang belum standar, dan kualitas infrastruktur yang belum memadai.

Proses pembelajaran untuk setiap mata pelajaran harus fleksibel, bervariasi, dan memenuhi standar, mengingat keberagaman budaya, keragaman latar belakang dan karakteristik peserta didik, serta tuntutan untuk menghasilkan lulusan yang bermutu. Konsep pembelajaran berbeda dengan pengajaran, pembelajaran bukan hanya transfer informasi dari guru kepada siswa saja tapi lebih luas lagi. Suyono & Hariyanto (2015: 90) menyatakan bahwa dalam kaitan untuk menggapai hikmah pembelajaran itu ada suatu tahapan yang harus dilalui siswa yang terdiri dari *learn*, *unlearn* dan *relearn*. *Unlearn* didefinisikan sebagai mencoba melupakan atau membuang suatu ingatan atau pengetahuan, membuang sesuatu yang semula dipelajari, seperti kebiasaan lama, dan tidak perlu memikirkannya, biarlah yang berlalu tetap berlalu, *lets bygones be bygones*. *Relearn* didefinisikan sebagai mempelajari sesuatu kembali, seperti halnya karena telah lupa atau mengabaikannya.

Kurikulum pendidikan umum berorientasi kepada kebutuhan peserta didik memperoleh pengetahuan, sikap dan keterampilan yang bersifat universal diperlukan dalam mengembangkan intelektual, sistem nilai, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan secara luas, dan terutama mempersiapkan siswa mena-paki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sedangkan kurikulum pendidikan kejuruan lebih cenderung untuk mempersiapkan peserta didik untuk memasuki dunia pekerjaan setelah lulus dari jenjang program pendidikannya. Kurikulum sebagai alat dalam proses pembelajaran tidak dapat mempunyai basis (Drost, J. 2005 :3), kurikulum sebenarnya bertujuan kompetensi, yang menghasilkan lulusan yang kompeten. Pemikiran tentang kompetensi ini mungkin lebih cocok untuk sekolah kejuruan yang memproduksi tenaga manusia yang siap masuk dunia kerja. Tetapi bagi sekolah umum kompetensi yang dimaksud adalah kemampuan dan kesiapan intelektual untuk melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi sehingga lulusan yang terbaik dari sekolah tersebut dapat diperhatikan oleh pihak berkompeten dalam hal ini dinas pendidikan, bagaimana lulusan dari suatu sekolah/madrasah itu dapat diterima di sekolah-sekolah yang kualitasnya lebih baik bahkan diharapkan ke luar negeri dengan mendapatkan bea siswa. Dalam hal ini kebijakan pemerintah dalam pengelolaan pendidikan sangat dibutuhkan terutama dalam peningkatan mutu pendidikan dan kualitas guru dalam mendidik sehingga lulusan yang dapat diandalkan pada tingkat sekolah/madrasah dasar dan menengah agar mereka yang lulus itu dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan mutu lulusannya menguasai bidang ilmu yang diminatinya.

Standar isi Mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi memuat kerangka dasar struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender akademik. Kurikulum pendidikan dapat digolongkan dalam dua bagian, yaitu isi (*content*) dan proses (Tuckman, 2019 : 228). Proses pendidikan merupakan kunci berlangsungnya proses belajar, dimana program pendidikan diimplementasikan. Bryk dan Hermanson menjelaskan "inti dari persekolahan adalah peningkatan akademik serta proses yang secara instrumental terkait di dalamnya." (1993 :455). Proses pembelajaran yang belum lancar dan kurang baik di banyak sekolah kita, menyebabkan rendahnya mutu pendidikan. Mutu proses pembelajaran sangat tergantung pada berbagai aspek, terutama fasilitas pendukung termasuk gedung, dan fasilitas peralatan, dan yang terutama adalah guru dan suasana pembelajaran.

Guru adalah tenaga pendidik, merupakan satu keahlian profesional yang berkompentensi dalam bidang pendidikan. Dalam proses globalisasi dimana perubahan terjadi sangat pesat guru dituntut untuk senantiasa menyesuaikan kompetensinya dengan perkembangan tersebut. Tilaar, H.A.R., (2004: 141-142) menulis : *“Today teachers participate in the process of change and development especially in preparing intelligent citizens and skilled manpower. In line with efforts towards universal basic education, a large number of teachers are required, mostly in a short time. This has bad effects on the teaching profession, . the requirements for entering the teaching profession are reduced. As a result the image of teaching profession is severely tarnished. The image of the teaching profession of yesterday has gone.”* Dari satu sisi, kita melihat banyak guru di kota-kota besar yang memiliki kompetensi mengajar dan menjalankan tugas secara profesional. Namun di banyak tempat di daerah dan pelosok-pelosok banyak tenaga pendidik yang rendah mutunya. Hal tersebut menjadi salah satu sebab mengapa kualitas pendidikan kita rendah. Akan tetapi seolah-olah mutu pendidikan tidak mau berkaitan dengan kualitas guru. Suparno (2005 :15). Rendahnya kualitas guru disebabkan oleh beberapa hal penting, seperti daerah tertentu memang tidak memiliki guru yang sesuai, kualitas calon guru, dan kualitas pendidikan di LPTK.

Standar sarana dan prasarana pendidikan mencakup ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, dan sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta fasilitas belajar-mengajar lainnya. Pemenuhan standar pendidikan ini Indikator-indikator standar sarana dan prasarana hendaknya disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masing-masing satuan pendidikan. Namun persyaratan minimal sarana dan prasarana yang mendukung terutama di daerah-daerah yang masih 3 T (terluar terdepan dan tertinggal). Tertinggal berarti memiliki kualitas pembangunan yang rendah, dimana masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Lalu dari sisi geografis berada di daerah terdepan dan terluar wilayah Indonesia, apa lagi pendidikannya sangat rendah begitu juga sarana dan prasarana di sekolah sangat minim dilihat dari segi kelayakannya. Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar seperti: gedung, ruang kelas, kursi, dan lain lain. Adapun yang dimaksud prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya pendidikan, seperti: halaman, kebun, taman sekolah, laboratorium, perpustakaan dan lain-lain, Mesiono, E, (2018 :74)

Standar Pengelolaan Granheim, (1990:90) mempertanyakan “Bagaimana bisanya pemerintah memanfaatkan evaluasi sebagai pengendalian dan pengarah pendidikan, sementara itu usaha desentralisasi terus digulirkan, baik aspek administrasi maupun konten pedagogik?” Kaitan antara desentralisasi dan modernisasi pendidikan pada dasarnya adalah usaha menembus birokrasi terpusat. Lundgren, menjelaskan bahwa evaluasi dapat saja menjadi dimensi ke-empat pemerintah yang dijadikan pengatur sistem hukum, ekonomi dan kontrol ideologi. Desentralisasi berperan dalam konflik pengelolaan dan memberi kekuatan baru bagi legitimasi politik pemerintah. Satuan pendidikan (sekolah) mempunyai otonomi “semu” sebab manajemen yang dilakukan lebih banyak merupakan implementasi kebijakan “*top-down*”. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan usaha mengembangkan otonomi pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Tetapi menjadi pertanyaan apakah ada demokrasi dan *independensi* disitu? Yang jelas MBS merupakan kebijakan pusat. Namun tanggung-jawab dan beban yang dilimpahkan bagi setiap satuan pendidikan semakin besar. Pertanyaan sejaumanakah kesiapan di tingkat unit tersebut? Otonomi daerah (termasuk otonomi pendidikan) merupakan kebijakan desentralisasi manajemen pendidikan, yang menurut Drost, J., (2005 : 116).

Standar Pembiayaan Kinerja pendidikan akan buruk jika tidak diimbangi dengan anggaran yang memadai. Kehidupan moderen masyarakat global, harus mengalami realitas bahwa “pendidikan itu mahal”. Para pemimpin negara ini sebenarnya menyadari bahwa anggaran pendidikan itu penting, mereka tahu bahwa masa depan bangsa sangat

tergantung pada mutu pendidikan. Namun, pengetahuan dan kesadaran pentingnya dana pendidikan itu, menurut Munawar S. (2005: 117), "tidak diimbangi dengan komitmen dan disiplin memadai."

Standar Penilaian Pendidikan Penilaian pendidikan meliputi penilaian hasil belajar oleh pendidik, oleh satuan pendidikan, oleh pemerintah, dan kelulusan. Evaluasi merupakan satu upaya dalam meningkatkan kualitas. Pelaksanaan evaluasi oleh guru lebih tepat jika dilakukan untuk membantu peserta didik belajar, atau oleh pihak sekolah untuk menjelaskan dengan benar pencapaian hasil belajar siswa. Penilaian kelas sebagai proses pengumpulan data dan penggunaan informasi oleh guru untuk memberikan keputusan, dalam hal ini nilai terhadap hasil belajar peserta didik berdasarkan tahapan belajarnya. Penilaian kelas dilaksanakan melalui berbagai cara seperti tes tertulis (paper and pencil test), portfolio (penilaian hasil kerja melalui kumpulan hasil karya, penilaian produk, penilaian proyek, dan penilaian unjuk kerja (performance). Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas (2004:90). Penilaian berbasis kinerja (performance-based asesment) : Asumsi penting dalam kritisasi terhadap sistem ujian adalah "*efek-deleterious*" dari sistem asesmen sebelumnya yang menerapkan akuntabilitas berbasis ujian. Untuk mengatasi persoalan tersebut, penilaian berbasis performansi menjadi alternatif yang erat kaitannya dengan kerangka kerja kurikulum.

Tujuan penilaian adalah agar peserta didik terbantu dengan informasi terukur, menyangkut baik kemampuan dan kelemahannya terhadap taraf pencapaian tujuan belajar. Melaksanakan evaluasi, menentukan nilai siswa merupakan pekerjaan guru yang paling berat. Nilai siswa berguna dalam berbagai hal, bahkan punya implikasi bagi masa depan. Manipulasi nilai/skor tes merupakan praktek yang telah lama berlangsung pada persekolahan di Indonesia, bukan untuk tujuan tambahan uang tetapi karena adanya perbedaan persepsi guru terhadap kemampuan anak-anak didiknya. Menetapkan nilai hasil belajar merupakan pekerjaan berat yang tak dapat disepelekan oleh guru. Ebel (1988 : 252) berpendapat "*Marking systems are frequent subjects of educational controversy because the process of grading is difficult, because different educational philosophies call for different marking systems, and because the task is sometimes disagreeable.*"

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pendidik, seorang guru dituntut mampu membuat dan mengelola administrasi kelas sehingga dapat mendorong peserta didik untuk belajar dengan baik yang memungkinkan tercapainya hasil yang baik pula dan pada gilirannya akan tercapai efektivitas pembelajaran. Pembelajaran yang efektif akan bermuara kepada kemampuan guru dalam proses pembelajaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas diartikan sebagai keefektifan sedangkan menurut Lipham dan Hoeh (dalam Mulyasa, 2014) meninjau efektivitas suatu kegiatan dari faktor pencapaian tujuan, yang memandang bahwa efektivitas berhubungan dengan pencapaian tujuan bersama bukan pencapaian tujuan pribadi. Implementasi Standar Nasional Pendidikan (SNP) Di Pendidikan Dasar Dan Menengah Di Madrasah Negeri Batu Bara

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Moleong mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Lexy J. Moleong, 2018:98)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan landasan berpikir untuk memahami suatu gejala dan fenomenologi, adapun jenis penelitian yang digunakan ialah studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan menggunakan pengamatan partisipatif (observasi), wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini akan mengkaji tentang Implementasi Standar Nasional Pendidikan (SNP) Di Pendidikan Dasar Dan Menengah Di Madrasah Negeri Batu Bara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada masa sekarang banyak madrasah yang menamakan dirinya sebagai lembaga pendidikan Islam unggulan. Namun tidak jelas kriteria dan standar yang diberlakukan pada masing-masing madrasah. Untuk mengatasi problem ini, maka sangat diperlukan standarisasi yang ditetapkan oleh pemerintah atau institusi yang memiliki kewenangan untuk memberikan penilaian terhadap performansi madrasah sebagai suatu lembaga pendidikan Islam. Hal ini sangat urgen sekali untuk dibahas dalam tulisan ini, karena kualitas layak tidaknya predikat unggulan bagi suatu madrasah akan mempengaruhi mutu dan kualitas pendidikan Islam dibanding dengan pendidikan atau institusi pendidikan pada umumnya. Mutu madrasah hendaknya dapat sejajar dan lebih unggul dari pendidikan umum unggulan lainnya.

pada saat keadaan yang sama, langkah-langkah awal pemerintah untuk mendukung adanya madrasah unggulan dan meningkatkan mutu dn kualitas madrasah, pemerintah dibawah naungan Departemen Agama melahirkan kebijakan-kebijakan dengan melahirkan *madrasah model*. Inspirasi adanya madrasah model berawal adanya lulusan-lulusan madrasah dan kualitas pendidikan di madrasah masih rendah dibandingkan dengan pendidikan umum lainnya. Oleh sebab itu kebijakan tersebutrealisasi sehingga dari segi manajemen, administrasi, personal dan lulusannya dapat mengembangkan dirinya melalui bantuan fasilitas, beasiswa pendidikan lanjutan bagi guru-guru dan lain-lain.

Madrasah yang mengatasnamakan dirinya sebagai sekolah Negeri dan madrasah diakui oleh pemerintah dan masyarakat, bukan oleh madrasah/sekolah itu sendiri. Karena keunggulan berarti memiliki nilai yang lebih dibanding dengan sekolah/madrasah yang lain dan tentunya nilai itu tidak hanya dapat dilihat dari aspek fisik, melainkan juga aspek-aspek lain yang sangat menentukan. Misalnya proses pembelajarannya ataupun output yang dihasilkan.

Begitupun juga sekolah yang mendapat predikat madrasah model dari pemerintah harus mampu menunjukkan dirinya sebagai sekolah yang layak dan pantas untuk dicontoh oleh sekolah atau madrasah lainnya. Bila dicermati, dari kebijakan ini, bahwa harus ada implementasi baik madrasah unggulan dan madrasah model untuk melibatkan teknologi pendidikan, salah satunya teknologi pembelajaran. Sekolah dan guru sebagai pelaku utama dalam penerapan madrasah unggulan dan madrasah model dituntut inovatif dan kreatif untuk menggunakan perangkat teknologi, sehingga mendukung kualitas pembelajaran. Penelitian ini menggali aspek-aspek keunggulan pada madrasah negeri yang ada di Batu Bara , yakni MTsN Batu Bara dan MAN Batu Bara. Karakteristik model yang menyandang pada kedua madrasah merupakan indikator utama bagi penulis untuk mengkategorikannya sebagai madrasah yang memiliki keunggulan. Dari sinilah kemudian penulis menggali aspek-aspek keunggulan dengan menggunakan standar nasional pendidikan (SNP) sebagai parameternya.

Kurikulum (Standar Isi, Standar Proses dan SKL)

Menurut Permendikbud Nomor 64 Tahun 2013, Standar Isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan kriteria muatan wajib yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan, dan karakteristik satuan pendidikan dan program pendidikan. Selanjutnya, tingkat kompetensi dirumuskan berdasarkan kriteria tingkat perkembangan peserta didik, kualifikasi kompetensi Indonesia, dan penguasaan kompetensi yang berjenjang. Secara umum, Standar Isi mencakup sasaran (goal) yang mencakup segala sesuatu yang terdiri dari berbagai aspek yang akan dicapai dan menjadi pengalaman belajar peserta didik. Hal ini sejalan dengan Urda dalam Ku dan Soulier bahwa "*Goals are generally defined as performance objectives, or what learners want to achieve*". Artinya, tujuan digambarkan secara umum sebagai sasaran hasil atau hal yang ingin dicapai siswa. Selain sasaran, Kriedl menambahkan bahwa "*Curriculum purposes typically include the goals, aims, and objectives an educational program*". Artinya tujuan kurikulum pada dasarnya terdiri dari sasaran, tujuan dan program pendidikan yang objektif. Sasaran pada kurikulum 2013 dituangkan dalam SKL, tujuan dituangkan dalam Standar Isi yang merupakan turunan dari SKL terdiri KI dan KD, dan

program pendidikan yang objektif dituangkan dalam Standar Proses dan Standar Penilaian.

Sedangkan standar isi menurut Permendikbud Nomor 64 tahun 2013 tentang, Kompetensi Inti (KI) adalah Kompetensi yang bersifat generik yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan kompetensi yang bersifat spesifik dan ruang lingkup materi untuk setiap muatan kurikulum. Kompetensi yang bersifat generik mencakup 3 (tiga) ranah yakni sikap, pengetahuan dan keterampilan. Ranah sikap dipilah menjadi sikap spiritual dan sikap sosial. Pemilahan ini diperlukan untuk menekankan pentingnya keseimbangan fungsi sebagai manusia seutuhnya yang mencakup aspek spiritual dan aspek sosial sebagaimana diamanatkan dalam tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian, Kompetensi yang bersifat generik terdiri atas 4 (empat) dimensi yang merepresentasikan: (1) sikap spiritual, (2) sikap sosial, (3) keterampilan, dan (4) pengetahuan. Kompetensi pada tingkat SD, yaitu. Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya serta cinta tanah air.

Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, dan mencoba menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dan kritis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Sedangkan standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang di dalamnya mencakup perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Berdasarkan data yang penulis temukan di lapangan maka dapat dipaparkan sebagai berikut:

Berdasarkan data yang diperoleh, maka dapat dilihat bahwa guru-guru baik di MTsN Batu Bara telah secara serius menyusun kegiatan berkaitan dengan standar isi, proses dan SKL dan hal ini di dukung oleh pihak sekolah melalui pimpinan dan unsur pimpinan serta fasilitas yang tersedia. Dalam mengembangkan materi-materi ajar yang dikemas dengan berbagai metode, strategi dan pendekatan tidak lepas dari tiga ranah Bloom yang dijadikan sebagai acuan, yakni ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. Dan yang terpenting adalah bahwa semua pengetahuan yang ditransformasikan telah diupayakan untuk diejawantahkan dalam membentuk karakter atau sikap siswa (*attitude*). Hal ini tercermin dalam sikap pergaulan mereka khususnya di lingkungan madrasah. Pembentukan karakter ini lebih diperkuat karena basic madrasah ini adalah ajaran Islam yang di dalamnya sarat dengan ajaran-ajaran berkaitan dengan akhlaq.

Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Tenaga pendidik dan kependidikan dalam proses pendidikan memegang peranan strategis terutama dalam upaya membentuk watak bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan. Dipandang dari dimensi pembelajaran, peranan pendidik (guru, dosen, pamong belajar, instruktur, tutor, widyaiswara) dalam masyarakat Indonesia tetap dominan sekalipun teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran berkembang amat cepat. Hal ini disebabkan karena ada dimensi-dimensi proses pendidikan, atau lebih khusus lagi proses pembelajaran, yang diperankan oleh pendidik yang tidak dapat digantikan oleh teknologi. Fungsi mereka tidak akan bisa seluruhnya dihilangkan sebagai pendidik dan pengajar bagi peserta didiknya. Begitu pun dengan tenaga kependidikan (kepala sekolah, pengawas, tenaga perpustakaan, tenaga administrasi) mereka bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Secara khusus Tugas dan Fungsi tenaga pendidik (Guru dan Dosen) didasarkan pada UU No 14 Tahun 2007, yaitu sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta

pengabdian kepada masyarakat. Dalam pasal 6 disebutkan bahwa : kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Berdasarkan temuan penulis ditemukan, bahwa para guru sudah berkualifikasi minimal S1, sebagian besar sudah ada yang S2 bahkan ada yang sedang S3.

Pada prinsipnya sekolah mendukung setiap keinginan para guru untuk lanjut studi atau mengikuti berbagai kegiatan yang sifatnya untuk peningkatan SDM, cuman memang tidak ada alokasi anggaran khusus untuk itu. Kebanyakan untuk lanjut studi mereka menggunakan biaya mandiri, dan pihak sekolah mencoba melobikan untuk beasiswa kepada pihak pemerintah provinsi. Selain itu sekolah juga melibatkan para guru dalam pelatihan atau workshop sesuai dengan tema workshop dan basik keilmuan guru bersangkutan. Yang sudah didapatkan tadi selanjutnya mereka terapkan dalam pembelajaran, seperti mengajar dengan metode dan strategi yang bervariasi yang membuat siswa tidak cepat jenuh. Siswa lebih banyak terlibat dan guru hanya menjadi fasilitator. Seperti pendekatan CTL yang menurut pengamatan saya cukup menarik karena seluruh prinsip yang ada di dalam yang menuntut siswa untuk aktif dan inisiatif dalam menggali informasi-informasi baru. Apalagi untuk tingkatan MAN yang memang secara psikologis mereka mulai tertantang untuk banyak tahu sehingga jika gurunya dapat mengelola kondisi ini maka akan banyak pengetahuan yang bias diserap oleh siswa. Selain itu variasi metode dan strategi mengajar juga sangat membantu, misalkan siswa yang tidak aktif dapat diajar oleh rekannya sendiri dengan menggunakan strategi tutor sebaya atau *information search*. Kendala kami memang kami memiliki lokasi yang berada di tengah-tengah kota, sehingga untuk mengajak siswa mencari dan menggali pengetahuan dan informasi harus keluar sekolah dan tentunya itu membutuhkan biaya. Sedangkan untuk tenaga kependidikan memang masih ada yang *doubling* yakni guru juga kita libatkan dalam tenaga administrasi, yang khusus hanya di bagian TU.

Standar Sarpras

Keberhasilan program pendidikan melalui proses belajar mengajar sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satu diantaranya adalah tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai disertai pemanfaatan dan pengelolaan secara optimal. Sebagaimana ditetapkan dalam UU sisdiknas No 20/2003 Bab XII pasal 45 ayat 1 dijelaskan bahwa: "Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik".

Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menyangkut standar sarana dan prasarana pendidikan secara nasional pada Bab VII Pasal 42 dengan tegas disebutkan bahwa : (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. (2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat rekreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

Berdasarkan temuan penulis, bahwa sapsras yang dimiliki oleh kedua madrasah sudah cukup memadai, menyesuaikan dengan standar SNP yang berlaku. Kendala hanya terdapat pada sarana toilet/WC pada kedua sekolah yang belum memenuhi rasio jumlahnya berbanding jumlah siswa, akan tetapi dari aspek kelayakan dan kebersihan cukup terjamin.

Standar Pembiayaan

Pembiayaan atau pendanaan dalam sebuah pendidikan adalah sebuah elemen penting bagi terselenggaranya proses belajar mengajar, pembiayaan dalam pendidikan berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program pendidikan yang dilaksanakan. Pembiayaan diperlukan untuk pengadaan alat-alat, gaji guru, pegawai, dan aktivitas dan kegiatan dalam institusi. Selain itu pembiayaan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran yang dilaksanakan. Biaya adalah keseluruhan pengeluaran baik yang bersifat uang maupun bukan uang, sebagai ungkapan rasa tanggung jawab semua pihak terhadap upaya pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Dalam penyelenggaraan pendidikan pembiayaan termasuk hal penting dalam mencapai pendidikan yang bermutu.

Standar pembiayaan pendidikan merupakan sebuah analisis terhadap sumber-sumber pendapatan dan penggunaan biaya yang diperuntukan bagi pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Standar pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal. Biaya investasi meliputi biaya pembelian sarana prasarana, pengembangan sumberdaya manusia dan modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Yang termasuk dalam biaya personal antara lain pakaian seragam, transportasi, buku pribadi dan sumber, konsumsi dan akomodasi.

Berdasarkan temuan penulis, kedua madrasah yang diteliti telah menyusun pembiayaan pendidikan mereka yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal. Biaya investasi meliputi biaya pembelian sarana prasarana, pengembangan sumberdaya manusia dan modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Yang termasuk dalam biaya personal antara lain pakaian seragam, transportasi, buku pribadi dan sumber, konsumsi dan akomodasi. Biaya operasi satuan pendidikan yang telah disusun oleh kedua madrasah meliputi: (1) gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; (2) bahan atau peralatan habis pakai; (3) biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan sebagainya. Yang menjadi kendala kemudian adalah sumber dana yang masih terbatas, karena kedua madrasah masih tergantung pada dana DIPA sebagai sumber utama dan juga masih berharap bantuan dari pihak lain.

Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan satuan pendidikan menjadi tanggung jawab kepala satuan pendidikan. Esensi dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang otonomi daerah adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Masalah ini membawa implikasi tersendiri dalam manajemen pelaksanaan pendidikan di tingkat sekolah. Salah satu pendekatan yang mengakomodasikan tuntutan terbaru pengelolaan pendidikan di daerah adalah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Nomor 053/u/2001. Konsep ini bertujuan untuk mendirikan, memberikan otoritas kepada sekolah, memberdayakan sekolah, keleluasaan mengembangkan program sekolah dan mengelola sumber daya dan potensi yang ada di sekolah sehingga akan terwujud sekolah yang efektif dan bermutu. Hal ini dapat terwujud

melalui peran kepala sekolah secara profesional dan maksimal. Berdasarkan temuan penulis, ada beberapa upaya yang telah dilakukan kepala sekolah di dua madrasah yang diteliti dalam meningkatkan kinerjanya sebagai edukator, khususnya dalam peningkatan kinerja tenaga kependidikan dan prestasi belajar peserta didik, upaya-upaya yang dimaksud antara lain:

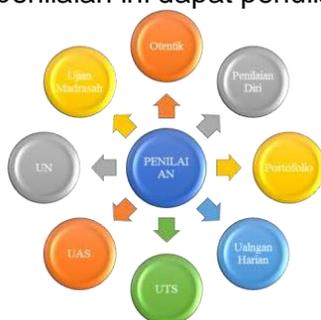
Pertama; mengikutsertakan guru-guru dalam pelatihan/workshop bahkan beberapa kali pernah dilaksanakan di internal sekolah. Selain itu juga memberikankesempatan kepada guru-guru untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dengan belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, hal ini dapat dilihat dari data bahwa beberapa guru sedang lanjut studi pada jenjang strata 2 di UNMUL dan IAIN Samarinda. Kepala sekolah kemudian mengupayakan mencari bantuan beasiswa pada pemerintah daerah. Pemerintah Daerah Kalimantan Timur setiap tahunnya menganggarkan beasiswa studi di semua jenjangnya melalui Program Beasiswa Kaltim Cemerlang;

Kedua; kepala sekolah di kedua madrasah, menggerakkan tim evaluasi hasil belajar peserta didik untuk lebih giat bekerja, kemudian hasilnya diumumkan secara terbuka dan diperlihatkan di papan pengumuman. Hal ini bermanfaat untuk memotivasi para peserta didik agar lebih giat belajar dan meningkatkan prestasinya. Kegiatan ini dilakukan secara berkala berlandaskan hasil monitoring dan evaluasi kinerja para tenaga pendidik dan kependidikan, dan;

Ketiga; menggunakan waktu belajar secara efektif di sekolah, dengan cara mendorong para guru untuk memulai dan mengakhiri pembelajaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, serta memanfaatkannya secara efektif dan efisien untuk kepentingan pembelajaran.

Standar Penilaian

Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrument penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Berdasarkan temuan penulis, penilaian yang telah dilakukan oleh kedua madrasah mencakup: penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis portfolio, ulangan, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester ujian nasional, dan ujian sekolah/madrasah. Bentuk penilaian ini dapat penulis gambarkan sebagai berikut:



SIMPULAN

Keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh madrasah yang menjadi tempat penelitian merupakan model di antara sekian banyak madrasah yang ada di Batu Bara. Keunggulan yang dimaksud didasarkan pada pemenuhan standar yang ditetapkan didalam SNP. Keunggulan ini juga berimplikasi pada minat masyarakat yang tinggi untuk menyekolahkan anaknya di kedua madrasah tersebut. Upaya yang dilakukan sekolah dalam memunculkan keunggulan-keunggulannya yakni dalam hal mencerdaskan siswanya pada aspek kognisi, afeksi dan psikomotorik dengan menyuguhkan model- model pembelajaran yang inovatif, kreatif dan menyenangkan. Selain itu sekolah juga telah menerapkan model manajemen

berbasis sekolah (MBS). Strategi sekolah dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk pencapaian delapan standar SNP yaitu dengan melibatkan berbagai pihak melalui komite dan stakeholders yang dinilai berkompeten dalam memenuhi kebutuhan pengembangan madrasah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifi, Ahmad. 2010. *Politik Pendidikan Islam: Menelusuri Ideologi dan Aktualisasi Pendidikan Islam di Tengah Arus Globalisasi*. Yogyakarta: Teras.
- AERA, *Educational Evaluation and Policy Analysis*, The World's New Political Economy is Politicizing
- Buchory Mochtar, 2000 *Notes on Education in Indonesia*, The Jakarta Post – The Asia Foundation, Jakarta,
- Gage N.L., Berliner D.C 1988., *Educational Psychology – 4th ed.*, Houghton_Mifflin, Boston,
- Jurnal Antropologi Indonesia & TIFA Foundation, Editor :Sunarto, K., dkk. 2004, *Multicultural Education in Indonesia : Stepping into the Unfamiliar*, Depok.
- Mesiono, 2018. *Efektivitas Manajemen Berbasis Madrasah/Sekolah Perspektif Ability and Power Leadership*. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga
- Nawawi, Hadari & Mimi Martini. 1994. *Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Ditinjau dari sudut hukum*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nitko, A.J 2001. *Educational Assessment of Students*, 3rd ed., Merrill Prentice_Hall, Columbus .
- Poerwadarminta. 1982. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka.
- Soedijarto. 2008. *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*. Jakarta : PT Kompas Media Nusantara.
- Surakhmad, Winarno. 2009. *Pendidikan Nasional Strategi dan Tragedi*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Tilaar, H.A.R ,2006. *Standarisasi Pendidikan Nasional: Suatu Tinjauan Kritis*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Tilaar, H.A.R. 2004. *Manajemen Pendidikan Nasional : Kajian Pendidikan Masa Depan*, RosdaKarya, Bandung
- Tuckman B.W 1985, *Evaluating Instructional Programs*, Bacon & Allyn, Newton,
- Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Bandung: Utra Umbara.
- Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*